

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurachman, Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1978).

-----, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1978).

Asri, Thabrani, dan Asri, Benyamin, Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata Dan Hukum Agraria, (Bandung: CV Armico, 1978).

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Welfare Indikator) 1989, (Jakarta: Biro Pusat Statistik Indonesia, 1989).

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1981).

Mirza, Iskandar, Kedudukan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Jakarta: Djambatan, 1982).

Nasikun, "Kesejahteraan Keluarga. Indikator, Determinan. Dan Implikasi Kebijaksanaannya", BKKBN (Yogyakarta: 21 Januari 1993).

Parlindungan, AP, Komentor Atas UUPA, (Bandung: Alumni, 1982).

-----, Serba-Serbi Hukum Agraria, (Bandung: Alumni, 1984).

Perangin, Effendi, Mencegah Sengketa Tanah, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982).

Projodikoro, Wiryono, Asas-Asas Hukum Perdata,
(Bandung: Sumur, 1962).

Suyitno, Haryono, Intervensi Sosial Dalam Mwujudkan
Keluarga Sejahtera, BKKBN (Semarang: 13 April 1993).

Statistik Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta: Biro Pusat
Statistik Indonesia, 1993).

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

-----, Metodologi Penelitian Hukum
Dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

-----, Studi Hukum Dan Masyarakat,
(Bandung: Alumni, 1985).

Soekanto, Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum,
(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1991).

Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian, Metode
Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1983).

Wignyodipuro, Suryo, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum
Adat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Di Atasnya.
4. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961

tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Di Atasnya.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta.
7. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 3 Desember Tahun 1975 Nomor 12/108/12/1975 tentang Petunjuk Mengenai Pelaksanaan Pembebasan Tanah.
8. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 19 Oktober 1976 Nomor SJ/16/10/41/1976 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976.
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.